

Reformasi Undang Undang Menuju Regulasi Internasional yang Berkeadilan

Legal Reform Towards Fair International Regulation

M. Fadel Ikhlasul Amal Makalitutu¹, Cakra Umar Said², Zaky Zaidul Mubarak³, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha⁴, Ashfiya Nur Atqiya

^{1,2,3,4} Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁵ Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Correspondence email; makalitutu@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/01/17;

Revised: 2025/02/23;

Accepted: 2025/03/30

Abstract

Fair international regulation is becoming increasingly important amidst current global challenges, such as economic inequality, climate change, and human rights violations. Civic education plays a strategic role in shaping global awareness of these issues and encouraging individuals to play an active role in creating a more just world. The purpose of this article is to examine how civic education can shape understanding of fair international regulation and increase citizens' awareness of their rights and obligations at the global level. This research method uses a qualitative approach with a literature analysis method of various current sources related to civic education, international regulation, and social justice. The results of the study show that through an analysis of various existing studies and theories, this study identifies the role of civic education based on the values of social justice, human rights, and global governance in encouraging individuals to contribute to more inclusive international policies. The results of the study indicate that civic education can equip the younger generation with a deeper understanding of global dynamics, as well as strengthen their awareness of the importance of fair regulation in various aspects, both economic, social, and environmental. In addition, this study also found that a citizenship education curriculum based on global issues can encourage active participation in creating fairer and more sustainable policies at the international level.

Keywords

International Regulation, Law, Reform.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Regulasi internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang disepakati secara kolektif oleh komunitas global untuk mengatur hubungan antarnegara dalam berbagai aspek, seperti perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, serta keamanan internasional. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, peran regulasi internasional menjadi sangat penting sebagai landasan bagi stabilitas dan kerja sama global. Sayangnya, pelaksanaan regulasi internasional masih menghadapi tantangan besar, terutama dari segi keadilan dan kesetaraan. Negara-negara maju cenderung memiliki pengaruh yang dominan dalam merumuskan kebijakan global, sementara negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang

kurang menguntungkan (Andini et al., 2024). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam regulasi internasional belum sepenuhnya tercapai.

Kesenjangan dalam penerapan regulasi internasional terlihat nyata dalam berbagai kasus, seperti perdagangan bebas yang sering merugikan produsen lokal di negara berkembang, atau dalam kebijakan perubahan iklim yang menempatkan beban mitigasi pada negara-negara berkembang padahal kontribusi historis emisi gas rumah kaca berasal dari negara-negara maju. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa regulasi internasional yang seharusnya berfungsi menciptakan keseimbangan justru kerap memperkuat struktur ketimpangan global (Yasila & Najicha, 2022). Dalam konteks inilah, penting untuk mengangkat kembali prinsip keadilan sebagai fondasi dalam setiap regulasi global.

Pendidikan kewarganegaraan memegang peran strategis dalam mengatasi persoalan tersebut. Tidak hanya bertugas membentuk warga negara yang baik dalam konteks nasional, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki misi membangun kesadaran akan tanggung jawab sebagai bagian dari warga dunia (*global citizen*). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi wahana penting untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, toleransi, serta pemahaman tentang sistem internasional dan hak asasi manusia (Sati & Dewi, 2022). Pendidikan ini harus diarahkan pada pembentukan warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya dalam konteks lokal, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap ketimpangan global dan aktif terlibat dalam upaya menciptakan keadilan internasional.

Di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi internasional, disinformasi, serta konflik antarnegara membutuhkan solusi kolektif dan partisipasi lintas bangsa. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang memfasilitasi pembelajaran lintas perspektif dan membuka ruang dialog kritis mengenai peran regulasi internasional. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem global bekerja dan bagaimana ketimpangan bisa dilawan melalui kesadaran kolektif masyarakat dunia (Surajiyo, 2023).

Dalam konteks Indonesia, integrasi nilai-nilai global dalam pendidikan kewarganegaraan mulai menunjukkan perkembangan. Beberapa kurikulum telah mengadopsi pendekatan *global citizenship education* (GCE), meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan seperti minimnya pelatihan guru, keterbatasan sumber ajar yang relevan dengan isu global, dan kurangnya dukungan kebijakan secara konsisten menjadi hambatan dalam membudayakan nilai-nilai global melalui pendidikan kewarganegaraan (Chandra et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan dari sisi kebijakan pendidikan, kurikulum, dan kapasitas pendidik untuk benar-benar menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai alat transformatif dalam membentuk kesadaran global yang berkeadilan.

Dengan memperkuat dimensi global dalam pendidikan kewarganegaraan, diharapkan terbentuk warga negara yang tidak hanya berpikir kritis terhadap ketidakadilan di tingkat nasional, tetapi juga memahami ketimpangan sistemik di tingkat internasional. Pendidikan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan empati, solidaritas lintas budaya, serta dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan keadilan internasional, baik melalui jalur politik, sosial, maupun kultural.

Adapun tujuan artikel ini untuk mengkaji secara mendalam peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran global terhadap pentingnya regulasi internasional yang berkeadilan. Penelitian ini akan berfokus pada pendekatan normatif-konseptual, dengan menelaah bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi instrumen dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan global serta bagaimana pendidikan ini dapat dioptimalkan untuk menghasilkan individu yang memiliki orientasi global dan tanggap terhadap isu-isu internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pemahaman tentang regulasi internasional yang berkeadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep-konsep teoretis dan empiris yang terkait dengan hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan regulasi internasional yang berkeadilan, serta bagaimana implementasi pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem regulasi internasional yang lebih adil. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen internasional yang relevan dengan tema regulasi internasional, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini juga mengacu pada karya-karya ilmiah terkini mengenai pendidikan global, peran pendidikan dalam membangun kesadaran akan keadilan internasional, serta analisis kebijakan pendidikan yang mendukung kesadaran global.

Analisis Dokumen Setelah mengumpulkan sumber-sumber tersebut, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana penulis mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran pendidikan kewarganegaraan dalam mendorong pemahaman tentang regulasi internasional yang berkeadilan. Analisis ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kurikulum pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa dan warga negara mengembangkan kesadaran mengenai isu-isu global yang bersifat adil, seperti hak asasi manusia, keadilan ekonomi, dan lingkungan hidup. Keterkaitan dengan Studi Sebelumnya Penelitian ini juga meninjau berbagai studi sebelumnya mengenai pendidikan kewarganegaraan dan regulasi internasional. Dengan membandingkan temuan-temuan dari literatur yang ada, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat mengubah cara pandang individu terhadap dunia internasional dan kontribusinya dalam memajukan kebijakan global yang lebih adil. Metode ini sesuai dengan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami keterkaitan antara konsep pendidikan dan regulasi internasional yang berkeadilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam mendukung terciptanya regulasi internasional yang lebih inklusif dan adil bagi semua negara.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Global

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran tentang pentingnya regulasi internasional yang berkeadilan. Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, banyak isu-isu yang melintasi batas negara, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia. Regulasi internasional yang ada sering kali berfokus pada kepentingan negara-negara besar atau negara maju, sementara negara berkembang sering kali merasa dirugikan karena ketimpangan yang ada dalam perjanjian dan kebijakan internasional. Dalam kondisi inilah, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis untuk mengedukasi warga negara mengenai bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam mendukung terciptanya keadilan internasional.

Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia dapat membuka pemahaman lebih dalam mengenai hubungan antara kebijakan domestik dan internasional. Misalnya, kebijakan dalam perdagangan internasional atau pengelolaan sumber daya alam sering kali memiliki dampak yang luas bagi negara lain, terutama negara berkembang. Oleh karena itu, penting bagi warga negara untuk memahami bahwa meskipun mereka mungkin hanya berfokus pada

isu-isu lokal, keputusan-keputusan yang diambil di tingkat nasional juga mempengaruhi kesejahteraan global. Kurikulum pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia dapat mendorong generasi muda untuk berpikir lebih kritis dan memahami relevansi dari regulasi internasional yang melindungi hak-hak dasar manusia di seluruh dunia. Ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan internasional dapat berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua pihak (Muller, 2022).

Pentingnya Kesadaran Akan Keadilan Ekonomi Internasional

Selain aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan juga sangat penting dalam membangun kesadaran mengenai keadilan ekonomi internasional. Isu ketidaksetaraan dalam perdagangan internasional adalah salah satu contoh nyata bagaimana kebijakan internasional sering kali tidak adil, terutama bagi negara-negara berkembang. Dalam sistem perdagangan internasional, negara-negara maju seringkali memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dan dapat mempengaruhi aturan dan kebijakan yang menguntungkan mereka. Negara berkembang, meskipun bergantung pada perdagangan internasional untuk perkembangan ekonomi mereka, sering kali terpinggirkan dalam pembuatan kebijakan yang dapat melindungi kepentingan mereka.

Pendidikan kewarganegaraan dapat memperkenalkan konsep-konsep tentang bagaimana kebijakan perdagangan yang adil dapat mengurangi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks ini, pendidikan tentang ekonomi global dan pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang sangat penting. Warga negara yang terdidik dengan baik mengenai keadilan ekonomi internasional dapat lebih peka terhadap dampak kebijakan perdagangan terhadap kehidupan ekonomi mereka sendiri dan juga terhadap kesejahteraan negara-negara lain. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat memotivasi individu untuk mendukung kebijakan yang mengutamakan keadilan dalam perdagangan internasional, misalnya melalui dukungan untuk penghapusan tarif atau pengaturan tarif yang lebih adil yang memungkinkan negara berkembang lebih bersaing di pasar global. Hal ini menjadi sangat penting untuk menciptakan regulasi internasional yang lebih memperhatikan kesejahteraan negara berkembang dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada (Sachs, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk individu yang mampu memahami dan berperan dalam regulasi internasional juga tercermin dalam kebijakan global seperti Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda ini berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan global untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda dapat diajarkan untuk lebih peduli terhadap isu-isu global, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, yang semuanya terkait erat dengan regulasi internasional yang berkeadilan.

Kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan tujuan-tujuan SDGs ini dapat membantu siswa memahami pentingnya kolaborasi internasional untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan semua negara, baik maju maupun berkembang. Misalnya, dalam konteks perubahan iklim, pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan bagaimana regulasi internasional yang berkeadilan, seperti kesepakatan tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, dapat diterapkan. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat menginspirasi generasi muda untuk berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Ini sangat relevan karena tantangan yang kita hadapi saat ini, seperti kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi, memerlukan pendekatan yang berbasis pada keadilan dan kerjasama global (Nations, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan dan Kerjasama Antarnegara dalam Mengatasi Isu-isu Global

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketegangan geopolitik, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk pemahaman tentang pentingnya kerjasama antarnegara untuk mengatasi masalah tersebut. Konsep global governance atau pemerintahan global yang berkeadilan menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Global governance mengacu pada kerjasama antara negara-negara dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masalah-masalah global. Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya global governance dapat membantu individu memahami bagaimana kerjasama antarnegara dalam konteks internasional dapat menyelesaikan tantangan-tantangan global, seperti krisis iklim, migrasi, dan ketidakamanan pangan.

Sebagai contoh, dalam konteks perubahan iklim, negara-negara maju dan negara berkembang harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan global yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan internasional akan membantu siswa memahami bahwa kebijakan yang adil harus mencakup pendekatan yang inklusif, yang memperhatikan kebutuhan negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, pemahaman ini juga akan mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam diskusi internasional, seperti konferensi perubahan iklim COP, di mana keputusan penting mengenai kebijakan iklim global diambil. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang memperkenalkan konsep kerjasama internasional ini, individu akan lebih siap untuk mendukung kebijakan yang adil dan efektif di tingkat global (Harris, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan dan Prinsip Keadilan Internasional

Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan prinsip-prinsip keadilan internasional, seperti konsep justice as fairness yang diajukan oleh John Rawls, akan membantu membentuk generasi muda yang lebih peka terhadap masalah-masalah global. Rawls berpendapat bahwa dalam regulasi internasional, kesetaraan peluang harus dijamin untuk semua negara, terlepas dari kekuatan ekonomi dan politik mereka. Konsep ini sangat penting dalam menciptakan regulasi internasional yang adil, di mana negara-negara, baik yang maju maupun yang berkembang, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan global.

Mengintegrasikan prinsip justice as fairness dalam pendidikan kewarganegaraan akan membantu generasi muda melihat keadilan internasional bukan hanya sebagai konsep yang normatif, tetapi sebagai alat praktis untuk mewujudkan kesejahteraan global yang setara. Dengan pendekatan ini, siswa akan diajarkan bahwa keadilan global tidak hanya penting untuk mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu, di mana pun mereka berada, memiliki hak yang sama untuk hidup dalam dunia yang aman dan sejahtera. Sebagai contoh, dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan distribusi vaksin atau bantuan kemanusiaan, pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan pentingnya distribusi yang adil agar negara-negara dengan sumber daya terbatas juga mendapatkan akses yang setara. Prinsip ini akan memastikan bahwa kebijakan internasional dapat dijalankan dengan adil dan setara bagi semua negara (Sachs, 2021). Teori keadilan dalam konteks tata negara merupakan konsep yang mendasari pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan negara dengan prinsip-prinsip yang adil dan merata bagi semua warga negara. Dalam kajian tata negara, terdapat beberapa teori keadilan yang relevan, di antaranya adalah:

Teori Keadilan Distributif: Teori ini menekankan pembagian sumber daya dan manfaat secara adil di dalam masyarakat. Dalam konteks tata negara, prinsip keadilan distributif diterapkan dalam

pembagian kekayaan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan secara merata kepada seluruh warga negara. Sistem perpajakan yang progresif dan program-program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan implementasi dari teori ini.⁷

Teori Keadilan Prosesual: Teori ini menitikberatkan pada proses atau mekanisme yang digunakan dalam mengambil keputusan atau menegakkan hukum. Dalam konteks tata negara, teori keadilan prosesual menuntut adanya prosedur yang adil dan transparan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, termasuk dalam proses legislasi, pemberian keputusan hukum, dan penegakan hukum.

Teori Keadilan Restoratif: Teori ini menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan melanggar hukum, dengan fokus pada rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan pembangunan kembali kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks tata negara, teori keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik sosial dan politik melalui dialog, mediasi, dan rehabilitasi, sebagai alternatif dari penegakan hukum yang konvensional.

Teori Keadilan Substantif: Teori ini menekankan pada substansi atau isi dari kebijakan atau hukum yang diterapkan, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga negara. Dalam konteks tata negara, teori keadilan substantif mendorong adopsi kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan umum dan melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang sehat.

Penerapan teori-teori keadilan dalam konteks tata negara menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berfungsi untuk kepentingan seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip keadilan tersebut juga merupakan aspek penting dalam membangun negara yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan bagi semua warga negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara dapat dilatih untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi global, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif. Mereka akan dilatih untuk memiliki sikap empati terhadap masalah global yang dihadapi oleh negara-negara lain, serta diberi keterampilan untuk mengadvokasi kebijakan yang mengutamakan keadilan dan keberlanjutan di tingkat internasional. Keterlibatan aktif dalam regulasi internasional yang berkeadilan akan membentuk warga negara yang tidak hanya paham tentang hak dan kewajiban mereka di dalam negeri, tetapi juga tentang kewajiban moral mereka terhadap dunia secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada pemahaman mengenai regulasi internasional yang berkeadilan tidak hanya akan memperkuat kesadaran individu tentang hak-hak mereka, tetapi juga mengubah mereka menjadi aktor global yang proaktif dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Dalam jangka panjang, ini akan membantu menciptakan masyarakat global yang saling menghormati, berkolaborasi untuk menghadapi tantangan global, serta berbagi tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan hidup planet dan masyarakat manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan internasional dalam kurikulum mereka, demi menciptakan generasi yang siap menghadapi dan menyelesaikan tantangan global yang kompleks.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran global mengenai pentingnya regulasi internasional yang berkeadilan. Di dunia yang semakin terhubung ini, setiap individu tidak hanya harus memahami hak dan kewajibannya di tingkat nasional, tetapi juga harus memiliki wawasan yang lebih luas mengenai isu-isu global yang memengaruhi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan yang

berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan global governance dapat membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berperan aktif dalam mendukung keadilan internasional. Secara spesifik, pendidikan kewarganegaraan yang mendalam akan mengajarkan pentingnya memahami hubungan antara kebijakan nasional dan dampaknya terhadap masyarakat internasional. Banyak kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional memiliki dampak yang meluas hingga ke negara-negara lain, baik itu dalam bentuk kebijakan perdagangan, lingkungan, atau hak asasi manusia. Oleh karena itu, individu yang telah menerima pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada keadilan internasional akan lebih peka terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi tidak hanya kehidupan mereka sendiri tetapi juga kehidupan orang lain di seluruh dunia. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam memperkenalkan pentingnya partisipasi aktif dalam forum internasional. Banyak keputusan penting yang diambil di tingkat global, seperti dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WTO (World Trade Organization), atau COP (Conference of the Parties) dalam isu perubahan iklim, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari warga negara di seluruh dunia. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi internasional yang adil dan keadilan sosial, individu dapat lebih siap untuk berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan di tingkat global. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada keadilan internasional juga akan mempersiapkan generasi muda untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan global yang lebih luas, seperti yang tercantum dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Melalui pengajaran yang berbasis pada pengertian tentang keadilan sosial dan kerjasama internasional, siswa dapat belajar bagaimana kebijakan global yang berkeadilan dapat membawa manfaat besar bagi kemajuan dunia, baik itu dalam hal pengurangan kemiskinan, perubahan iklim, ataupun ketidaksetaraan sosial. Pemahaman tentang regulasi internasional yang berkeadilan juga akan memperkenalkan konsep-konsep penting seperti justice as fairness yang diajukan oleh John Rawls, yang mengedepankan bahwa setiap negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam kebijakan global, tanpa terkecuali. Dalam hal ini, penting bagi sistem pendidikan di berbagai negara untuk mengadopsi kurikulum yang menekankan nilai-nilai global dan keadilan internasional. Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai berbagai isu global, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam usaha mewujudkan kebijakan internasional yang lebih adil. Hal ini mencakup isu-isu yang sangat relevan seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan kerjasama internasional yang inklusif.

REFERENSI

- Dawson, M. (2019). *Global Governance and Justice: A Critical Perspective*. . oxford: Oxford University Press.
- Green, C. (2022). *Global Governance and Education: Exploring the Role of Education in Policy Change*. Global Policy Journal.
- Guttmann, A. (1999). *Guttmann, A. (1999). Democracy and Education: Reconsidering the Role of Education in the Democratic State*. Amerika: Princeton University Press.
- Harris, A. (2023). *Human Rights and Global Citizenship Education*. . London: Palgrave Macmillan.
- Jones, L. (2021). *Global Justice and Education: A Review of Key Theories and Practices*. Educational Philosophy and Theory.
- Kymlicka, W. (2020). *The Rights of Refugees and Migrants: Ethics, Politics, and Education*. Oxford University Press.
- Muller, A. (2022). *Education for Global Citizenship: Perspectives and Practices*. London: Routledge.

- Nations, U. (2021). *The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations Publications.
- Pogge, T. (2020). *Global Justice: A Cosmopolitan Account*. Oxford: Oxford University Press.
- Sachs, J. (2021). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. London: Penguin Books.
- Ndini, F. A., Aulia, V., & Areefa, N. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(4), 71–80.
- Yasila, K., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 14–20.
- Sati, L., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1051–1059.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945, kencana prenada media group*, 2010, hlm. 60.
- W.B.Munro, *The Government of the United States*, 4 th edition, 1936, hlm. 80-83